

Judul : Stabilkan harga beras, negara harus kuasai pangan
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Stabilkan Harga Beras

Negara Harus Kuasai Pangan

ANGGOTA Komisi IV DPR Riyono menyoroti keterlambatan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keterlambatan ini dinilai menjadi biang naiknya harga beras di masyarakat.

Riyono mengatakan, pengendalian harga yang seharusnya dilakukan rutin enam kali dalam setahun tidak berjalan tepat waktu sehingga stabilisasi pasar gagal tercapai.

Setelah petani panen, Pemerintah seharusnya segera menyerap hasil produksi untuk cadangan pangan.

"Namun kenyataannya sering tertunda. Penyaluran beras SPHP baru berjalan akhir Juli lalu, ketika harga sudah telanjur tinggi," kata politikus PKS itu kemarin.

Dia juga menyoroti lemahnya penguasaan pasokan beras oleh Pemerintah. Saat ini, negara hanya menguasai sekitar 5 persen cadangan beras, sementara 95 persen dikuasai swasta. "Pangan strategis harus dikuasai negara. Jika beras bisa dikendalikan, harga SPHP

dapat dijaga stabil setiap tanggal 1 dan 15," ujarnya.

Riyono juga mendorong evaluasi berkala terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang selama ini ditetapkan tahunan. Idealnya HET dievaluasi tiap tiga bulan sekali. "Tidak ada alasan menunda, apalagi soal anggaran. Uang rakyat harus kembali untuk kebutuhan rakyat," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Ananda Tohpati menekankan pentingnya percepatan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP oleh Bulog. Ia juga meminta aplikasi Klik SPHP dipermudah agar pengecer tidak kesulitan. "Aplikasi harus simpel dan mudah dipahami, disertai sosialisasi masif," ucap politikus NasDem itu.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran beras SPHP berjalan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Per Rabu (20/8), sekitar 45 ribu ton sudah tersalurkan dengan target hampir 7 ribu ton per hari. ■ **PYB**